

## ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) TAHUN 2013-2020

Nizar Fahmi\* dan Nugroho Sumarjiyanto Benedictus Maria

Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,  
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

\*Corresponding Email: [nizarsmart65136@gmail.com](mailto:nizarsmart65136@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the classification of economic development, development inequality, and the effects of economic growth, the open unemployment rate, and the Human Development Index (HDI) on development inequality in the DIY Province from 2013 to 2019. The approach used in this research is quantitative, utilizing secondary data obtained from Badan Pusat Statistik for the years 2013 to 2019. The method employed to analyze the classification of economic growth is Klassen typology. The Williamson Index is used to analyze development inequality, while panel data regression is applied to examine the factors influencing development inequality. Based on the results of the research on the classification of economic development, it is evident that areas with advanced and fast development are Yogyakarta and Sleman, while fast-developing areas include Kulonprogo, and relatively underdeveloped areas are Gunungkidul and Bantul. The results of the Williamson Index indicate that the largest development inequality exists in the Kulonprogo, Bantul, and Gunungkidul areas, suggesting that there is inequality in community access to development outcomes. Furthermore, the results of the panel data regression show that the economic growth variable has an insignificant negative effect on development inequality, the unemployment variable has a significant positive effect on development inequality, and the HDI variable has a significant negative effect on development inequality in DIY Province. To reduce development inequality in DIY Province, it is necessary to increase employment opportunities based on regional potential and improve human resources to achieve inclusive economic growth.*

*Keywords: Development Classification, Development Inequality, and Economic Growth.*

 <https://doi.org/10.14710/djoe.37965>



[This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license](#)

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dan negara kepulauan terbesar di dunia dengan keberagaman sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal ini memicu timbulnya ketidakmerataan pembangunan antar wilayah. Jhingan (2010) mengungkapkan bahwa investasi akan menyebabkan terjadinya ketimpangan. Hal ini disebabkan karena tidak semua kabupaten/kota menjadi sasaran investasi. Pulau Jawa merupakan wilayah di Indonesia yang pembangunan ekonominya dinilai sangat pesat karena berdekatan dengan ibu kota negara. Terdapat enam provinsi besar

di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur Pertumbuhan ekonomi tiap provinsi di Pulau Jawa menempati urutan tertiggi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi di provinsi DIY terus mengalami kenaikan namun masih menempati posisi terendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Hal ini memicu ketimpangan wilayah antara kabupaten/kota di Provinsi DIY. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mengalami peningkatan pembangunan ekonomi yang pesat dari kabupaten lainnya. Kajian mengenai ketimpangan sangat penting dilakukan, hal ini dikarenakan ketimpangan merupakan salah satu tolak ukur dalam proses pembangunan suatu daerah. Faktor yang diduga berpengaruh terhadap ketimpangan di DIY adalah PDRB, IPM, dan tingkat pengangguran.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Dasar Pembangunan Ekonomi Regional**

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat dan menjadi cerminan timbulnya perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Todaro, 2007). Kemanjauan pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan sebuah wilayah namun dalam praksisnya pasti diikuti dengan problematika kemiskinan dan kesenjangan. Dalam upaya meningkatkan kapasitas variabel ekonomi sebuah wilayah maka pembangunan ekonomi regional sangat diperlukan khususnya dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan yang terjadi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusianya saja tetapi menekankan pada efisiensi. Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan angkatan kerja. Para ekonom meyakini bahwa kualitas tenaga kerja yang berupa keterampilan, pengetahuan, dan disiplin angkatan kerja merupakan unsur terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya tenaga kerja yang terampil dan terlatih, barang-barang modal yang tersedia tidak akan dapat digunakan secara efektif. . Masalah ini bukan hanya menjadi cakupan nasional namun juga regional sehingga kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

### **Ketimpangan Pembangunan Wilayah**

Ketidaksegraman yang berpengaruh pada kemampuan suatu daerah untuk tumbuh dimana beberapa wilayah dapat tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh dengan lambat. Hal tersebut perlu diatasi supaya Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah di Indonesia Ketimpangan pembangunan merupakan problematika interegion yang diartikan sebagai kondisi ketimpangan antar wilayah yang disebabkan karena ketidakmerataan pembangunan antar wilayah.

Teori ketimpangan pembangunan wilayah dilatarbelakangi oleh teori ketidakseimbangan wilayah yang muncul sebagai reaksi terhadap konsep ketidakstabilan dan keseimbangan dari teori neo-klasik. Teori ketidakseimbangan wilayah mengasumsikan kekuatan pasar tidak akan mampu menghilangkan perbedaan antar wilayah bahkan sebaliknya yang justru cenderung memperburuk keadaan.

Myrandal dalam Quraisyhab (2020) mengelaborasi teori penyebab kumulatif dan berputarnya proses sosial untuk menjelaskan ketimpangan antar wilayah sehingga ditemukan fakta bahwa kekuatan yang bekerja dalam proses pertumbuhan ekonomi yaitu efek balik negatif (*Backwash Effect*) dan efek penyebaran (*Spread Effect*). Efek balik negatif dan penyebaran menunjukkan konsekuensi spasial dari pertumbuhan ekonomi terpusat baik negatif maupun positif. Kekuatan efek penyebaran mencakup penyebaran hasil produksi bagi wilayah yang belum berkembang, penyebaran inovasi dan teknologi, sedangkan efek balik negatif biasanya melampaui efek penyebaran dengan ketidakseimbangan aliran modal dan tenaga kerja dari wilayah pada sistem pasar bebas cenderung memperburuk kinerja ekonomi wilayah yang belum berkembang.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung melalui *gross domestic product potensial* (output) dari suatu daerah. Total PDRB menunjukkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu. Secara umum, produk domestik regional bruto (PDRB) dihitung melalui dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral / lapangan usaha dan dari sisi penggunaan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (Boediono, 1992).

### **Pengangguran**

Angkatan kerja yang cenderung meningkat cepat namun tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja yang signifikan menyebabkan problematika pengangguran yang cukup serius khususnya di negara berkembang (Hajji dan Nugroho, 2013). BPS (2020) mendefinisikan pengangguran diartikan sebagai persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Masalah pengangguran yang mendistorsi kesejahteraan masyarakat yang tidak mencapai potensi maksimal merupakan masalah makroekonomi yang fundamental.

### **Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia memiliki peran sentral dalam membentuk kemampuan sebuah wilayah untuk berkembang melalui penyerapan teknologi modern dan pengembangan kapasitas *human capital* dalam upaya mencapai tingkat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam *Human Development Report* dijelaskan bahwa Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan konstruksi pengukuran atas dasar konsep *right based approach to human development*. HDI mengukur rata-rata capaian setiap individu yang menyangkut tiga dimensi dasar dalam proses pengembangan kualitas manusia. Pengukuran ini dilakukan dengan menetapkan beberapa asumsi dasar bahwa manusia yang berkualitas adalah: Manusia yang dapat hidup sehat dan panjang umur, Manusia yang memiliki kecakapan dan pendidikan yang diperlukan bagi hidupnya, dan Manusia yang dapat mencapai standar hidup layak.

Oleh karena itu, paradigma pembangunan manusia kini menjadi tema sentral dalam wacana perdebatan mengenai isu-isu pembangunan. Orientasi pembangunan pun bergeser dari sekadar mencapai tujuan makroekonomi seperti peningkatan

pendapatan nasional dan stabilitas fiskal, ke upaya memantapkan pembangunan sosial (Wiwieko dan Nugroho, 2015).

## **Determinan Ketimpangan Wilayah**

### ***Hubungan Ketimpangan Wilayah dengan Tingkat Pembangunan Ekonomi***

Pertumbuhan ekonomi dan disparitas regional memiliki hubungan yang secara empiris. Mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Pada awal proses pembangunan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi dan pada akhir proses pembangunan ketimpangan menurun.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata di seluruh lapisan masyarakat. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat yang pada akhirnya menurunkan tingkat ketimpangan wilayah (Faiz dan Nugroho, 2011).

### ***Hubungan Pengangguran dengan Ketimpangan Wilayah***

Fenomena pengangguran menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat sehingga mengurangi penerimaan pemerintah daerah dari segi penghasilan pajak yang berakibat pada penurunan pengeluaran pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat sulit tercapai (Ibrahim, 2019). Di mana terdapat korelasi positif antara pengangguran dan disparitas regional yang artinya pengangguran yang tinggi akan diikuti dengan meningkatnya disparitas regional.

Fakta tersebut mengalami peningkatan jumlah pengangguran akan meningkatkan disparitas regional. Hal tersebut terjadi karena secara makro pengangguran berdampak pada menurunnya daya beli penduduk disuatu wilayah sehingga penerimaan akan menurun yang pada akhirnya mengurangi belanja dan anggaran untuk pembangunan.

### ***Hubungan IPM dengan Ketimpangan Wilayah***

Pembangunan manusia merupakan indikator penting dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi mencerminkan investasi sumber daya manusia yang tinggi yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas. Dalam penelitian Syarifah (2020) menemukan fakta bahwa terdapat korelasi yang cukup signifikan antara indeks pembangunan manusia dan disparitas regional. Peningkatan indeks pembangunan manusia dalam sebuah wilayah akan menurunkan disparitas regional.

Peningkatan IPM salah satunya disebabkan secara signifikan karena proses pembangunan yang semakin gencar. Apabila pembangunan semakin gencar dilakukan maka fasilitas umum semakin lengkap dalam suatu wilayah, maka secara tidak



langsung akan meningkatkan nilai IPM. Hal ini dapat dijadikan indikator dalam upaya mengurangi ketimpangan pembangunan yang terjadi di antar wilayah.

## Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Didia (2018) dengan judul Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur melalui metode analisis OLS menemukan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur serta telah terjadi konvergensi di Kawasan Kedungsepur.

Penelitian Nuartha (2018) dengan judul Analisis Determinan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Jawa Tengah 1998-2015 melalui metode analisis regresi OLS dan Indeks Williamso menemukan fakta bahwa tingkat ketimpangan rata-rata pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong tinggi. Hasil analisis metode OLS menunjukkan bahwa hanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian Handoko, Riyanto, dan Yunan (2018) dengan judul Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Kalimantan Timur melalui metode analisis indeks willamson dan regresi data panel menemukan fakta bahwa nilai ketimpangan yang terjadi tergolong rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi, di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2013-2018.

Penelitian Syarifah (2020) dengan judul Determinan Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah pada Provinsi-Provinsi Di Indonesia melalui metode analisis tipologi klasen, indeks Williamson, dan regresi data panel menemukan fakta bahwa kawasan timur memiliki tren negatif, sedangkan pada kawasan barat konstan. Indeks Williamson indeks memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel dummy dari perbedaan kawasan barat maupun timur, PDRB per kapita, dan populasi. Selain itu, IPM memiliki hubungan negatif signifikan terhadap Indeks Williamson di Indonesia.

Penelitian Gratia dan Nugroho (2021) dengan judul Analisis Ketimpangan Antar Wilayah Di 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya dengan menggunakan metode Indeks Willamson dan regresi data panel menemukan fakta bahwa pertumbuhan tiap variabel mengalami ketimpangan antar wilayah di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Desentralisasi fiskal, belanja langsung dan tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap disparitas wilayah sedangkan belanja tidak langsung dan inflasi berpengaruh negatif terhadap daerah disparitas di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian Pamiati dan Woyanti (2021) dengan judul Analisis Pengaruh Pengangguran, Pembangunan Ekonomi, Dan IPM Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2013-2019 melalui metode analisis Tipologi Klasen, Indeks Wiliamson, dan regresi data panel menemukan fakta bahwa Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Kebumen berada pada kelompok daerah berkembang pesat, sedangkan Cilacap berada pada kelompok daerah maju tapi tertekan. Analisis Indeks Williamson menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb tergolong rendah. Selanjutnya, ditemukan bahwa bahwa secara simultan Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb tahun 2013-2019.

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi (terikat) oleh nilai variabel lain dan merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi pada variabel bebas (variabel independen). Pada penelitian ini variabel dependen yaitu Ketimpangan Pembangunan (KP) yang didefinisikan sebagai ketidakmerataan pembangunan pada suatu daerah dengan daerah lainnya dalam satu wilayah. Data ketimpangan pembangunan diperoleh dari perhitungan indeks williamson dengan menggunakan perbandingan nilai PDRB perkapita kabupaten/kota di Provinsi DIY dengan jumlah penduduk di DIY Tahun 2013-2020 dalam satuan persen (%).

### **Variabel Independen**

Variabel independen adalah variabel yang bebas yang mempengaruhi perubahan nilai pada variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen sebagai berikut:

#### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan atau penurunan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi barang/jasa. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di kabupaten/kota Provinsi DIY tahun 2013-2020 dalam satuan persen.

#### **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pengangguran terbuka menurut BPS adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Data pengangguran pada penelitian ini didapat dari data tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi DIY dalam kurun waktu 2013-2020 (dalam satuan persen).

#### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM merupakan capaian pembangunan manusia yang meliputi Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata Lama Sekolah, dan Daya Beli Masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.

#### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY, publikasi jurnal terkait, dan studi literatur. Data sekunder yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan dari data time series dengan periode 2013-2020 dan data *cross-section* yang meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul.

## Metode Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi yaitu dengan menggunakan data yang berkaitan dengan objek penelitian yang didapatkan dari BPS Provinsi DIY, jurnal, maupun artikel terkait penelitian.

## Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan yaitu *Indeks Williamson* guna mengukur ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi DIY, sedangkan untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan pertumbuhan ekonomi menggunakan Analisis *Tipologi Klassen*. Nilai *Indeks Williamson* yang sudah diketahui digunakan sebagai variabel dependen untuk mengetahui pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan IPM terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi DIY dengan pendekatan analisis regresi data panel menggunakan *software Eviews 10*.

## Indeks Williamson

*Indeks Williamson* adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui besaran ketimpangan pembangunan antar kabupaten/ kota di Provinsi DIY Tahun 2013-2020. Perhitungan *indeks williamson* didasarkan pada perbandingan nilai PDRB dengan kumulatif jumlah penduduk di kabupaten/kota Provinsi DIY tahun 2013-2020. Nilai *indeks williamson* berkisar antara 0-1, semakin mendekati 1 maka ketimpangan antar daerah tinggi, dan sebaliknya apabila hasil mendekati nol maka distribusi pembangunan semakin merata dan tingkat ketimpangan rendah.

## Tipologi Klassen

Analisis *Tipologi Klassen* digunakan untuk menganalisis pola pembangunan ekonomi di setiap kabupaten penyangga di Provinsi DIY. *Tipologi Klassen* juga digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau PDRB perkapita daerah yang kemudian diklasifikasikan menjadi empat golongan.

Tabel 1. Tipologi Klassen

Kuadran I	Kuadran II
Kab/kota Maju dan Cepat Tumbuh	Kab/kota yang Berkembang Cepat
a. $LPE_i > LPE$ rerata provinsi	a. $LPE_i > LPE$ rerata provinsi
b. $Y_i > Y$ rerata provinsi	b. $Y_i < Y$ rerata provinsi
Kuadran III	Kuadran IV
Kab/kota Maju tapi tertekan	Kab/kota relatif tertinggal
a. $LPE_i < LPE$ rerata provinsi	a. $LPE_i < LPE$ rerata provinsi
b. $Y_i > Y$ rerata provinsi	b. $Y_i < Y$ rerata provinsi



### Regresi Data Panel

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh laju Pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi DIY yaitu analisis regresi Data Panel. Tujuan dari digunakannya metode analisis regresi yaitu untuk mengestimasi dan memprediksi nilai pengaruh ketimpangan pembangunan (variabel dependen) berdasarkan nilai variabel independen (Pertumbuhan ekonomi, TPT, dan IPM) kabupaten/kota di Provinsi DIY.

Model fungsi persamaan dasar penelitian adalah sebagai berikut:

$$KP = f(PE, TPT, IPM) \quad (1)$$

berdasarkan penjelasan tersebut, maka model persamaan ekonometrika yang digunakan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$KP = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \varepsilon \quad (2)$$

keterangan:

KP = Ketimpangan Pembangunan

PE = Pertumbuhan ekonomi (laju PDRB ADHK dalam persen)

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (persen)

e = error

### Analisis Data Panel

Teknik analisis data panel dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan metode *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*.

#### Model Pooled (*Common Effect*)

Model Common Effect adalah model yang paling sederhana, karena metode yang digunakan hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*.

#### Model Efek Tetap (*Fixed effect*)

Pada model *fixed effect*, setiap variabel merupakan parameter yang tidak diketahui dan harus diestimasi dengan menggunakan teknik variabel dummy guna mengurangi banyaknya *degree of freedom* yang pada akhirnya akan mempengaruhi keefisienan dari parameter yang diestimasi (Gujarati, 2015).

#### Model Efek Acak (*Random Effect*)

Dalam metode ini perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan dengan error dari model.

### Uji Kesesuaian Model

Uji Chow digunakan untuk menguji kesesuaian model apakah menggunakan metode *common effect* dan metode *fixed effect* yang sebaiknya digunakan dalam pemodelan data panel. Hipotesis dalam uji chow ini sebagai berikut:

Ho : Model Common Effect

H1 : Model Fixed Effect

### **Uji Hausman**

Uji ini digunakan untuk menentukan spesifikasi model yang lebih baik digunakan apakah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) dalam estimasi regresi data panel. Kriteria pengujian:

H0: Pengujian yang paling tepat digunakan adalah REM

H1: Pengujian yang paling tepat digunakan adalah FEM

## **HASIL DAN ANALISIS**

### **Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DIY**

Tren laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya meningkat setiap tahunnya hanya di tahun 2013-2014 mengalami penurunan. Fakta empiris yang menarik terkait pertumbuhan ekonomi terjadi di Kabupaten Kulonprogo dimana pada tahun 2018 dan 2019, laju pertumbuhan PDRB nya tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lain bahkan diatas regional dan nasional. Menurut Setiowati dan Andari (2020) kondisi tersebut terjadi karena berkembang pesatnya infrastruktur khususnya pembangunan *Yogyakarta International Airport* (YIA). Kabupaten Kulon Progo awalnya merupakan daerah termiskin dan tertinggi angka kemiskinannya dari lima kabupaten/kota di DIY, tetapi sejak adanya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo di atas dua digit tertinggi di DIY.

### **Tingkat Pengangguran di Provinsi DIY**

Keberhasilan pembangunan ekonomi sebuah daerah dapat dilihat pula berdasarkan kemampuan dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan lapangan kerja akan menstimulasi peningkatan jumlah pekerja yang berdampak pada menurunnya kemiskinan dan ketimpangan.

Rata-rata persentase pengangguran pada kurun waktu 2013-2020 di Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar 1,9 persen sedangkan di Kabupaten Kulonprogo sebesar 2,6 persen. Rendahnya tingkat pengangguran di kabupaten tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa lapangan usaha didominasi oleh pertanian perkebunan, dan peternakan. Fenomena yang terjadi ketika masa panen tiba, tingkat pengangguran rendah sedangkan ketika masa tunggu terjadi peningkatan pengangguran secara signifikan.

### **Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi DIY**

Investasi kepada manusia merupakan hal yang fundamental untuk memajukan pembangunan sebuah daerah secara berkelanjutan. Parameter untuk mengukur pembangunan manusia adalah indeks yang terdiri atas komponen pendapatan perkapita, tingkat kesehatan, dan pendidikan. Angka IPM yang tinggi dapat diartikan bahwa investasi dalam hal sumber daya manusia daerah tersebut juga tinggi, yang kemudian akan menurunkan ketimpangan (Khoir dan Pujiati, 2016).

Pembangunan manusia sebagai cerminan kualitas modal manusia di kabupaten tersebut lebih rendah dari regional dan nasional sehingga upaya peningkatan kapasitas

melalui investasi fisik maupun non-fisik diperlukan dalam upaya perbaikan IPM. Fakta menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo berada di pinggiran kota sehingga infrastruktur serta akses pendidikan dan kesehatan lebih rendah dibanding daerah yang berada di pusat kota.

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan klasifikasi pertumbuhan ekonomi menggunakan analisis *Tipologi Klassen*, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013- 2020 Provinsi DIY terbagi menjadi 3 daerah yaitu daerah maju dan cepat tumbuh terdiri dari Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, daerah berkembang pesat yaitu Kabupaten Kulonprogo, dan daerah relatif terbelakang yaitu Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.
2. Berdasarkan *Indeks Williamson* menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2013-2020 ketimpangan pembanguana di Provinsi DIY fluktuatif namun tergolong kategori tinggi berkisar antara 0,5-0,9 (50% - 90%). Ketimpangan tertinggi terjadi di Kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul dan Bantul berkisar antara 0,8-0,9, sedangkan terendah di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta berkisar antara 0,5-0,6.
3. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Povinsi DIY, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan ketimpangan antar wilayah.
4. Variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, yang artinya semakin tinggi pengangguran maka ketimpagan wilayah juga semakin besar karena keterbatasan lapangan.

### **REFERENSI**

- Amin, D. (2019). Disparitas pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku: Analisis tipologi Klassen dan indeks Williamson. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(01).
- Andhiani, K. D., Erfit, E., & Bhakti, A. (2018). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 26–34.
- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 196–210.
- Anwar, A. (2017). *Peran modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Jawa* (Master's thesis, Yogyakarta State University).
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Boediono. (2001). *Pengantar ilmu ekonomi No.2: Ekonomi makro* (2nd ed.). Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2021). *Indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta tahun 2013-2020*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2021). *PDRB per kapita ADHK di Indonesia tahun 2010-2020*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2021). *Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ADHK tahun 2016-2020*.

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2021). *PDRB ADHK kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2013-2020*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2021). *Tingkat pengangguran kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2013-2020*.
- Didia, K. A. (2016). Analisis ketimpangan pembangunan di kawasan Kedungsepur. *Economics Development Analysis Journal*, 5(1), 101–108.
- Dwiningtias, Y. D. P., & Mahmudah, M. (2019). Analisis regresi ordinal model logit untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 8(2), 174–182.
- Elbar, D., Fitriadi, F., & Gaffar, E. U. A. (2021). Pengaruh investasi swasta, pengeluaran pemerintah, dan indeks pembangunan manusia terhadap produk domestik regional bruto serta ketimpangan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 6(2).
- Faiz, A. A., & Nugroho, N. (2011). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, tingkat pengangguran, dan panjang jalan terhadap ketimpangan antar wilayah menurut tipologi Klassen pada 25 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2004-2008 (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Gratia, Y. C., & Nugroho, S. B. M. (2021). Analisis ketimpangan antar wilayah di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 31–40.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2015). *Dasar-dasar ekonometrika* (5th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hajji, M. S., & Nugroho, S. B. M. (2013). Analisis PDRB, inflasi, upah minimum provinsi, dan angka melek huruf terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 1990-2011. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(3), 36–45.
- Handoko, M. S. H., Riyanto, W. H., & Syaifullah, Y. (2020). Determinan ketimpangan pembangunan ekonomi di kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(4), 637–649.
- Ibrahim, M. M. (2019). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), penanaman modal asing (PMA), dan pengangguran terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2012-2018 (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta).
- Irkham, M. (2019). Analisis ketimpangan wilayah Provinsi Banten. *Akuntabel*, 16(1), 98–110.
- Islami, F. S., & Nugroho, S. B. M. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 33(1).
- Kauffman, B. E., & Hotchkiss, J. L. (1999). *The economics of labor markets*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, kebijakan, dan politik ekonomika pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Lessmann, C. (2012). Regional inequality and decentralization: An empirical analysis. *Environment and Planning A*, 44(6), 1363–1388.
- Mopangga, H. (2011). The analysis of development and economy growth inequality in Gorontalo Province. *Trikonomika*, 22(1).

- Mu'minin, M. A. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. *KINERJA*, 18(4), 680–688.
- Ningrum, P. N. C., & Indrajaya, I. G. B. (2018). Pengaruh pendidikan, penanaman modal asing, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7(2), 22–30.
- Nuartha, L. D. (2018). Analisis determinan ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah tahun 1998-2015. *URECOL*, 323–328.
- Nuartha, L. D. (2018). Analisis determinan ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah tahun 1998-2015. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 157–183.
- Nuraini, I. (2017). Kualitas pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15, 79–93.
- Pamiati, B. A., & Woyanti, N. (2021). Analisis pengaruh populasi, pertumbuhan ekonomi, TPAK, dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan di kawasan Barlingmascakeb tahun 2013-2019. *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, 4(1), 17–28.